

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA TEORITIS

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Pengertian Pengembangan

Pengembangan adalah proses yang melibatkan perbaikan dan pertumbuhan dalam berbagai aspek kehidupan, baik secara individu, organisasi, maupun masyarakat (Safri, 2016). Menurut Howard Gardner yang dikenal dengan teori kecerdasan majemuknya memandang pengembangan sebagai proses yang melibatkan pertumbuhan berbagai jenis kecerdasan atau potensi dalam diri seseorang. Dalam pandangan Howard pengembangan adalah tentang mengidentifikasi dan mengasah berbagai bentuk kecerdasan dan kemampuan yang dimiliki individu (Fitria & Marlina, 2020).

Pengembangan pariwisata adalah suatu usaha untuk mengembangkan atau memajukan objek wisata agar, objek wisata tersebut lebih baik dan lebih menarik ditinjau dari segi tempat maupun benda-benda yang ada di dalamnya untuk dapat menarik minat wisatawan untuk mengunjunginya (Barreto dan Giantari, 2015:34).

Dalam konteks perencanaan pengembangan bahwa menekankan beberapa pendekatan strategis, seperti partisipasi masyarakat, potensi budaya lokal, dan pendekatan kewilayahan untuk mendukung keberlanjutan pengembangan pariwisata (Sastrayuda, 2010:6-7).

Pengembangan adalah memajukan atau memperbaiki serta meningkatkan sesuatu yang sudah ada. Suwantoro juga memaparkan prinsip-prinsip

pengembangan pariwisata berkelanjutan, termasuk perencanaan, partisipasi masyarakat, pelestarian budaya, dan pengelolaan dampak lingkungan (Suwantoro, 2002:88-89).

Hasibuan, (2020) dalam konteks pengembangan sumber daya manusia pengembangan adalah suatu usaha meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan melalui pendidikan dan pelatihan.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengembangan adalah suatu usaha sistematis, berkesinambungan terarah untuk meningkatkan kualitas, potensi, dan manfaat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

2.1.2 Desa Wisata

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 bahwa desa wisata yaitu daerah yang menjadi tujuan wisata, yang mana sudah berintegrasi dengan beberapa unsur lainnya secara komprehensif. Unsur tersebut meliputi fasilitas pariwisata, daya tarik wisata, serta akses yang disajikan berdasarkan struktur daerah tersebut. Bahkan, biasanya unsur tersebut melekat dengan tradisi yang berlaku di daerah atau desa tersebut.

Desa wisata adalah wilayah administratif desa yang memiliki potensi dan keunikan daya tarik wisata yang khas, yaitu merasakan pengalaman keunikan dan tradisi masyarakat di pedesaan dengan segala potensinya (Wisnawa dkk., 2021:23)

Desa wisata merupakan suatu kawasan yang di dalamnya terdapat kehidupan alami dan merupakan bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan

fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku (Baiquni, 2021:6.5).

Desa wisata adalah suatu desa yang menyelenggarakan suatu kepariwisataan sebagai salah satu kegiatan desa disamping kegiatan-kegiatan pedesaan lainnya, baik untuk mencapai tujuan-tujuan sosial, budaya, maupun ekonomi desa tersebut. Desa wisata merupakan masa depan pariwisata Indonesia dan sebagai simbol kebangkitan ekonomi. Desa wisata adalah usaha yang dijalankan oleh penduduk desa setempat, atau melalui kerja sama dengan pihak lain, dimana di desa tersebut memiliki daya tarik dan keunikan tersendiri, seperti keterpaduan antara atraksi, budaya dan lingkungan yang dikemas dengan baik. Pada akhirnya, desa wisata yang dikelola dengan baik dan unggul dapat berimplikasi pada kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat (Riana dkk., 2022:8).

Desa wisata adalah salah satu fenomena pariwisata alternatif di Indonesia yang perlu dicermati. Desa wisata mengalami perkembangan yang pesat karena memiliki banyak potensi, terutama penghapusan kemiskinan dan alternatif pembangunan secara berkelanjutan secara fokus pengembangan yang kontekstual pada level lokal, yaitu pada entitas desa. Kemudian desa wisata seringkali dipadankan pada istilah *tourism village* maupun *farm and rural tourism* (pariwisata pedesaan dan pertanian) yang mulai menge mukakan secara international pada akhir 1980 (Dalidjo, 2024:12).

Dalam pandangannya bahwa desa wisata merupakan *Community-Based Tourism* (CBT) atau yang biasa disebut dengan pariwisata berbasis masyarakat,

merupakan model pembangunan yang memberikan peluang kepada masyarakat pedesaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan pariwisata yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat. Di mana masyarakat lokal berperan penting dalam pengembangan desa wisata karena sumber daya dan keunikan tradisi yang melekat pada komunitas tersebut merupakan unsur penggerak utama kegiatan desa wisata (Riana dkk., (2022:9).

Desa wisata adalah tempat-tempat alami diluar perkotaan yang terdiri dari wilayah pertanian, peternakan, dengan jumlah penduduk sedikit yang dilengkapi dengan akomodasi ramah lingkungan. Desa wisata dibentuk oleh masyarakat desa sesuai dengan adat istiadat yang berkembang di dalamnya. Desa wisata merupakan hasil kombinasi dari atraksi, akomodasi, serta fasilitas dari sebuah daerah yang mempunyai daya tarik tertentu seperti alam, kebudayaan, bangunan buatan, hingga kebiasaan yang ada didaerah tersebut, nantinya akan menghasilkan suatu destinasi wisata yang bisa menarik perhatian masyarakat dari daerah lain (Peranginangin, 2025:1).

Desa wisata merupakan *Community-Based Tourism* (CBT) atau biasa disebut pariwisata berbasis masyarakat, merupakan model pembangunan yang memberikan peluang kepada masyarakat pedesaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan pariwisata yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Di mana masyarakat lokal berperan penting dalam pengembangan desa wisata (Sudibya, 2018).

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa desa wisata merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam pembangunan pariwisata

berkelanjutan. Desa wisata adalah usaha yang dijalankan oleh penduduk setempat karena mempunyai daya tarik wisata yang khas untuk menghadirkan wisatawan ketika berkunjung dengan memperhatikan komponen-komponen wisata diantaranya aspek atraksi, akses, akomodasi, fasilitas pendukung dan aspek pengelolaan.

2.1.2.1 Karakteristik Desa Wisata

Karakteristik adalah khas atau sifat yang membedakan suatu hal, individu, atau kelompok dari yang lain. Karakteristik dapat mencakup aspek ifik, perilaku, kepribadian, atau fungsi tertentu yang unik dan menjadi identitas sesuatu. Sebuah desa wisata dapat dijadikan desa wisata bila mempunyai karakteristik tertentu. Adanya klasifikasi ini, akan membuat wisata yang ada di desa wisata tersebut menarik perhatian pihak luar desa. Sehingga, tidak hanya sekedar membuat destinasi wisata ala kadarnya. Namun, desa wisata juga harus mempunyai karakteristik tertentu. Jadi, nantinya desa wisata tersebut akan berbeda dengan desa pada umumnya (Peranginangan, 2025:7).

Ada beberapa karakteristik yang membuat desa tersebut bisa disebut desa wisata. (i) mempunyai budaya yang unik dan tidak ada di tempat lain, (ii) mempunyai panorama alam yang menawan dan bisa memberikan pengalaman yang berbeda, (iii) adanya kegiatan wisata yang menarik, seperti berkeliling desa, wisata edukatif, dan yang lainnya, dan (iv) mempunyai akses yang mudah untuk dikunjungi oleh warga dari luar desa.

Menurut Wisnawa, dkk., (2021) desa wisata dapat dilihat berdasarkan kriteria, yaitu:

- a. Memiliki potensi daya tarik wisata
- b. Memiliki komunikasi dengan masyarakat
- c. Memiliki potensi sumber daya manusia lokal yang terlibat dalam aktivitas pengembangan desa wisata
- d. Memiliki kelembagaan pengelolaan
- e. Memiliki dukungan dan ketersediaan fasilitas dan sarana prasarana dasar untuk mendukung kegiatan wisata
- f. Memiliki potensi dan peluang pengembangan pasar wisatawan

2.1.2.2 Tipe Desa Wisata

Tipe adalah kategori atau kelompok yang memiliki karakteristik tertentu yang membedakannya dari kategori lain. Tipe ini digunakan untuk mengklasifikasikan sesuatu berdasarkan sifat, bentuk, fungsi, atau karakteristik lainnya.

Desa wisata pun memiliki coraknya tersendiri. Suatu konsep perencanaan dan pengembangan terhadap suatu desa menuju desa wisata, tidak bisa diberlakukan tanpa adanya penyesuaian dengan karakter khusus dari desa tersebut. Kompleksitas desa terjadi mengingat desa berlokasi di tempat dan ciri geografis yang beragam. Begitupun dengan perbedaan suku bangsa yang berbeda-beda mengingat keragaman konteks desa-desa di Indonesia (Dalidjo, 2024:59)

Pada masa Orde Baru, kita telah dikenakan pada pengelompokan desa berdasarkan perspektif pembangunan. Hingga kini pun, klasifikasi tersebut masih diterapkan dalam berbagai kebijakan dan program pemerintah. Misalnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) masih membagi desa ke dalam desa tertinggal dan desa tidak tertinggal untuk mengaitkannya pada minimnya ketersediaan serta akses terhadap pelayanan dasar, infrastruktur, aksesibilitas, transfortasi pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa mengategorikan desa secara hierarkis menjadi desa swadaya, swakarya, swasembada. Desa swadaya sering kali dianggap sebagai desa yang belum mengelola potensinya dengan baik, masyarakat masih traditional, berada jauh dari kota, serta terbelakangan karena kekurangan SDM dan dana. Desa swakarya di sisi lain menjadi wujud transisi dari desa yang swadaya menuju swasembada atau juga disebut dengan desa maju (Dalidjo, 2024:60). Oleh karena itu, desa yang dikategorikan maju oleh pemerintah, yaitu desa swasembada adalah desa yang mampu memanfaatkan dan mengembangkan potensinya, memiliki kehidupan yang mirip dengan kota, serta mempunyai sarana dan prasarana yang lengkap (Dalidjo, 2024:60).

Lebih lanjut, dijelaskan tiga jenis desa tersebut juga dikaitkan pada pembagian berdasarkan derajat kemiskinan dan akses (terpencil atau tidak) Penjabaran jenis-jenis desa wisata ini tidak berlaku secara hierarkis dan bukan bermaksud untuk menilai bahwa desa tertentu lebih baik atau layak untuk dikembangkan sebagai desa wisata, melainkan dengan melihat kekhasan yang dominan pada suatu desa, maka akan turut mempengaruhi pendekatan terhadap bagaimana suatu desa seharusnya mengalami pengembangan dengan

mengindahkan keunikan aspek ekonomi, sosial-budaya, maupun lingkungan yang terdapat di desa (Dalidjo, 2024:61).

Suatu desa wisata tentu juga dapat di kelompokkan ke dalam lebih dari satu kategori antara lain:

1. Berdasarkan Struktur Administrasi Wilayah

Desa wisata berdasarkan struktur administrasi wilayah terbagi menjadi dua, yaitu desa wisata di tingkat kabupaten dan desa wisata di tingkat kota. Desa wisata yang berada di tingkat kabupaten pada umumnya memiliki corak yang lebih kental dengan kultur agraris atau maritim dan dominan kawasan pedesaan. Bandingkan dengan desa wisata yang berada di tingkat kota yang cenderung memiliki kawasan urban yang tumbuh lebih cepat. Selain itu, pendekatan terhadap perencanaan dan pengembangannya haruslah memiliki pendekatan pada level kebijakan setempat yang berbeda antara pemerintah kabupaten dan kota terkait desentralisasi serta otonomi daerah, khususnya pada penentuan tata ruang kota serta permukiman penduduk pada pembangunan jangka menengah dan panjang.

2. Berdasarkan Keadaan Fisik Wilayah

Desa wisata berdasarkan fisik wilayah dikelompokkan dengan melihat fitur permukaan atau kondisi fisik yang membentuk suatu desa. Contohnya antara lain, desa wisata di dataran tinggi (perbukitan/pegunungan), desa wisata di pantai dan kepulauan, desa wisata di bantaran sungai, desa wisata di dalam atau kawasan hutan, desa wisata di kawasan pertanian, dan desa wisata dengan topografi khusus lainnya, seperti perbukitan kars, lahan basah atau rawa, gambut, bakau, dsb. Keadaan fisik suatu desa akan menentukan bagaimana pembangunan dan

penyesuaian fisik dilakukan. Di satu sisi, keadaan fisik adalah hal yang apa adanya dan menjadi karakter utama, tetapi tantangan bagi desa tertentu terdapat pada penyusainan infrastruktur dan akses transformasi bagi wisatawan.

3. Berdasarkan Ciri Lokasi Desa

Desa wisata berdasarkan ciri lokasi desa dapat dipilih lagi menurut kelompok lingkungan alam, pengaruh sejarah, maupun pola sosial-kultural dan ekonomi. Untuk kelompok lingkungan alam, cakupannya terkait iklim, vegetasi keragaman hayati (flora dan fauna), area pantai dan kepulauan, dan hal-hal terkait corak alam. Hal ini hampir serupa dengan pengelompokkan pada keadaan fisik wilayah, tetapi pada kategori ini, fitur berupa alam cakupan yang lebih spesifik sebagai ciri, bukan pembentuk desa.

4. Berdasarkan Tipe Atraksi

Desa wisata berdasarkan tipe atraksi dilihat dari pembagian variabel atraksi wisatawan maupun aktivitas wisatawan yang terbagi ke dalam tiga kelompok utama, alam, budaya, dan minat khusus. Atraksi alam yang terdiri dari iklim, keindahan, pantai dan laut, flora dan fauna, fitur spesial alam, area konservasi (termasuk taman nasional dan kawasan lindung), serta wisata kesehatan nonmedis. Atraksi budaya terdiri dari situs budaya (termasuk situs bersejarah dan arkeologi), pola budaya yang unik, seni dan kerajinan, aktivitas ekonomi yang menarik, museum dan fasilitas budaya lainnya, festival kebudayaan, serta keramah-tamahan masyarakat. Atraksi minat khusus bagi desa wisata mencakup *meeting, incentive, conference/convention, exhibition* (MICE) atau fasilitas petemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran yang dilakukan di desa,

kemudian olahraga, atraksi berupa fasilitas atau pelayanan (misalnya keunikan *homestay*, transfortasi traditional, kuliner, dsb).

5. Berdasarkan Mata Pencaharian

Desa wisata berdasarkan mata pencaharian mengacu pada dominasi pekerjaan/sumber penghidupan maupun usaha-usaha utama dari masyarakat desa untuk pemenuhan kebutuhan sehari-harinya. Hal ini mempertimbangkan bahwa mata pencaharian/usaha desa adalah bagian dari masyarakat desa, suatu keutamaan bagi masyarakat desa yang unik dan menarik untuk dijadikan berbagai atraksi bagi wisatawan. macam-macam desa wisata jenis ini adalah desa wisata petani, nelayan, penenun, gerabah dan keramik, dll. Bagi desa wisata kategori ini, prioritas pengembangan pariwisata memiliki keunikan dalam memberikan dukungan proses skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

6. Berdasarkan Musim

Desa wisata berdasarkan musim memiliki kondisi khusus bahwa suatu desa akan ramai dikunjungi wisatawan pada periode dengan kecendrungan tertentu. Musim ini bisa mengacu pada iklim dan cuaca yang memberikan fitur alam tertentu bagi desa yang mempengaruhi elemen kepariwisataan. Musim pula bisa berarti atraksi budaya yang hanya terjadi pada saat tertentu, misalnya festival budaya pada panen padi. Artinya keunikannya hanya dapat dinikmati secara sesekali saat tertentu saja. Oleh karena itu, perhatian khusus pada corak ini perlu diberikan pada perbedaan musim yang berdampak pada sepinya wisatawan pada saat yang tidak musik. Dampak tersebut secara tidak langsung berpengaruh pada keseimbangan desa pada saat yang berbeda.

7. Berdasarkan Lama Kunjungan

Desa wisata berdasarkan lama kunjungan wsatawan dipengaruhi oleh lamanya waktu wisatawan untuk mengkonsumsi atraksi wisata. oleh karena itu, terdapat pengelompokan desa wisata untuk kunjungan kurang lebih dari 24 jam (wisatawan menginap atau tidak). Keterkaitan ini juga erat dengan asal kedatangan wisatawan yang biasa diterminologikan dengan *long-haul traveller* dan *short-haul traveller*.

Pengelompokan desa wisata pada situasi tersebut dapat dikategorikan lagi jadi desa wisata sebagai desatinasi wisata dengan elemen yang komplit atau menyeluruh, desa wisata sebagai penopang destinasi, dan desa wisata yang hanya menjadi penopang kebutuhan desa wisata. pada kelompok yang pertama, desa wisata dapat digambarkan dengan kondisi desa yang dapat menampung kunjungan *tourist* secara keseluruhan. Artinya, desa mampu memenuhi kebutuhan wisatawan dan memiliki seluruh element kepariwisataan secara matang. Desa wisata sebagai penopang destinasi dapat mengacu pada dukungan yang terbatas terhadap salah satu elemen kepariwisataan saja, misalnya desa yang menyediakan *homestay*, desa yang menyediakan makanan/jasa rumah makan, atau desa yang menyediakan dukungan pada salah satu fasilitas wisata saja.

Sementara itu, desa wisata yang menjadi penopang kebutuhan desa wisata lain, misalnya disitusasikan bahwa desa wisata tersebut hanya menjadi penyuplai suatu kebutuhan bagi destinasi wisata lainnya, seperti desa tani yang memproduksi dan mendistribusikan kebutuhan sayur untuk destinasi wisata terdekat.

8. Berdasarkan Interaksi

Untuk kategori akhir ini, sebagian kalangan ada yang menyebutkan sebagai destinasi wisata interaksi langsung atau tidak langsung adalah pengembangan dengan melihat apakah masyarakat desa melakukan interaksi secara langsung seandainya desa wisata tersebut memiliki potensi dan kapasitas terhadap elemen-elemen pengembangan kepariwisataan, sehingga wisatawan dapat merasakan langsung pengalaman hidup di desa bersama dengan masyarakatnya. Desa wisata apa pun kategorinya memiliki persinggungan dengan tipe pariwisata lainnya sebagai pendekatan bagi proses perencanaan dan pengembangan. Desa wisata dengan corak kuat pada alam, menjadi lebih condong pada ekowisata (*ecotourism*). Lain lagi dengan desa dengan kekayaan berupa situs sejarah budaya yang memiliki kecocokan terhadap pengembangan bentuk pariwisata sejarah-budaya (*cultural-heritage tourism*). Sementara bagi desa wisata dengan kultur dan aktivitas ekonomi, seperti pertanian yang menjadi tulang punggung desa, maka desa wisata menyesuaikannya dengan pariwisata agrikultur/agrowisata (*agriculture tourism*). Apapun pendekatan yang dipilih suatu desa wisata terhadap refrensi atau identitas pariwisatanya, hal itu merupakan suatu strategi serta bentuk penyesuaian dengan pembangunan elemen lainnya dalam ruang lingkup pembangunan desa dan pariwisata yang berkelanjutan.

Menurut Peranginangin (2025:8) sementara, ada dua tipe desa wisata berdasarkan pola pengelolaannya. Dua tipe desa wisata tersebut mempunyai perbedaan yang cukup signifikan, baik itu dari segi pola dan pengelolaannya.

- a. Tipe desa wisata terstruktur ini biasanya mempunyai lahan yang terbatas.

Selain itu, dari segi infrastruktur juga lebih spesifik. Lahan yang digunakan juga terpisah dari pemukiman warga. Jadi, memang pengelolaan desa wisata tipe ini lebih mudah dikontrol. Tidak hanya itu, pemukiman warga juga tidak terganggu dan tercemar. Biasanya, tipe desa wisata ini akan lebih mudah menembus pasar *international*.

- b. Tipe terbuka yang mana berbeda dengan yang sebelumnya. Lahan pada tipe ini cenderung lebih luas dan yang pasti menyatu dengan pemukiman warga. Kelebihan dari tipe ini adalah warga setempat bisa ikut ambil dalam pembangunan wisata. sehingga, ekonomi warga sekitar juga akan semakin meningkat. Tapi, desa wisata dengan tipe ini juga cenderung sulit untuk dikendalikan dan dikelola dengan baik.

Dua tipe di atas mempunyai pengelolaan yang berbeda. Karena dari segi lokasi juga sudah berbeda. Masing-masing tipe mempunyai kelebihan tersendiri. Selain tipe desa wisata tersebut, ada juga beberapa jenis wisata yang bisa dijadikan acuan untuk pembangunan desa wisata yang lebih optimal.

- 1. Desa Wisata Berbasis SDA: Jenis yang pertama yaitu ada desa wisata yang mempunyai potensi dari sumber daya alam. Desa wisata ini akan menyajikan tujuan wisata berupa alam. Seperti pegunungan, sungai, lembah, bukit, hutan, dan yang lainnya.
- 2. Desa Wisata Berbasis Kebudayaan: Kehidupan budaya di sebuah desa bisa juga dijadikan destinasi wisata yang unik. Tradisi atau budaya yang masih dilakukan oleh warga di desa tertentu, dapat dijadikan potensi dijadikan wisata yang dapat memikat perhatian banyak orang.

3. Desa Wisata Berbasis Kreatif: Selain alam dan kebudayaan, sebuah desa juga bisa menciptakan potensi sendiri agar desanya tersebut dapat dijadikan tujuan wisata. seperti dengan wisata kerajinan tangan, misalnya membuat sebuah ukiran atau gerabah.
4. Desa Wisata Kombinasi: Terakhir, ada jenis wisata kombinasi. Jadi, diantara tiga jenis di atas bisa dikombinasikan menjadi satu. Misalnya, wisata alam dipadukan dengan wisata kreatif. Namun, bisa juga wisata alam dipadukan dengan kebudayaan yang ada.

Setiap desa wisata bisa menentukan sendiri tipe serta jenis wisata yang akan diterapkan. Namun, harus disesuaikan juga dengan potensi dari desa tersebut. Sehingga, nantinya bisa memanfaatkan potensi potensi wisata tersebut dengan baik dan optimal. Desa pun bisa berkembang dengan maksimal.

2.1.2.3 Komponen Desa Wisata

Menurut Wisnawa dkk., (2021:24).supaya desa wisata menjadi maju dan berkembang maka perlu memperhatikan bagian-bagian penting yang harus ada, sebagai berikut:

- a. Batasan geografis ataupun administratif yang jelas
- b. Potensi daya tarik wisata
- c. Masyarakat yang antusias dan memiliki komitmen mendukung pengembangan desa wisata
- d. Fasilitas pariwisata sebagai unsur pendukung wisatawan dalam melakukan aktivitas wisata di era desa tersebut
- e. Sarana prasarana lingkungan

- f. Organisasi pengelolaan desa wisata
- g. Sumber daya manusia

2.1.3 Pengembangan Desa Wisata

Pengembangan pariwisata perlu dijadikan sebagai bagian dari pembangunan nasional yang berkelanjutan (*sustainable development*) maka pengembangan pariwisata harus dilakukan dalam kesatuan yang terpadu dengan sektor-sektor pembangunan lainnya (Suwantoro, 1997:81).

Pengembangan adalah suatu usaha yang dilakukan guna menambah nilai pada suatu yang sudah ada. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pengembangan berasal dari kata “Kembang” yang berarti menjadi besar, luas, banyak atau menjadi bertambah sempurna dan pemngembangan berarti proses, cara atau perbuatan pengembangan. Pengembangan yaitu, suatu usaha atau proses yang dilakukan guna untuk menyempurnakan sesuatu yang telah ada yang menjadi sesuatu yang lebih baik kedepannya (Supriono, 2020:14).

Pengembangan pariwisata diartikan sebagai sesuatu yang dilakukan untuk meningkatkan dan memajukan kepariwisataan. Pengembangan destinasi pariwisata adalah upaya yang dilakukan guna mengembangkan kegiatan pariwisata melalui proses perencanaan yang baik dan matang dengan tujuan meningkatkan sumber daya yang ada, sehingga berguna untuk meningkatkan minat berkunjung wisatawan. Alasan yang digunakan sebagai landasan perlunya dilakukan pengembangan yaitu sebagai berikut:

- a. Pengembangan pariwisata berkaitan dengan pembangunan perekonomian daerah maupun Negara,

- b. Pengembangan pariwisata lebih banyak bersifat non ekonomis, dalam artian wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah tujuan wisata yang menjadi salah satu motivasinya yaitu untuk menyaksikan dan melihat keindahan alam, tempat bersejarah, bangunan-bangunan kuno, perkebunan dan lain sebagainya, dan
- c. Untuk mengurangi kecemasan berpikir, mengurangi salah satu pengertian atau salah satu persepsi dan mampu mengetahui tingkah laku orang lain yang berkunjung, utamanya bagi masyarakat lokal. Adanya pertukaran dan interaksi antar wisatawan dengan penduduk setempat akan dapat membuka mata dan pengetahuan penduduk sekitarnya dalam banyak hal, serta dengan adanya pariwisata, perbedaan pandangan, penafsiran dan salah pengertian dapat dihilangkan.

Pemerintah saat ini sangat menggalakan pariwisata, salah satunya adalah melalui desa wisata. namun fakta yang ada, semua desa wisata memenuhi harapan, bahkan tidak sedikit semangat sadar wisatanya luntur. Fakta lain menunjukkan bahwa, beberapa kegiatan pariwisata (desa wisata) dilakukan tanpa memperhatikan lingkungan, dimana terjadi pemangkasan hutan, atau bahkan tanpa perencanaan yang matang, padahal, pengembangan dari desa wisata harus direncanakan secara berhati-hati agar dampak yang timbul dapat dikontrol. Oleh karena itu, pembangunan desa wisata tidak hanya membangun, tapi perlu konsep yang matang, dan yang tidak kalah pentingnya adalah sistem pengelolaannya. (Riana dkk., 2022:8).

Menurut Yoeti, (2008:77) alasan utama pengembangan pariwisata suatu daerah tujuan wisata, baik secara lokal, regional, atau ruang lingkup nasional pada suatu negara sangat erat kaitannya dengan pembangunan perekonomian atau negara tersebut. Dengan kata lain, pengembangan kepariwisataan pada suatu daerah tujuan wisata selalu akan diperhitungkan dengan keuntungan dan manfaat bagi masyarakat. Uang yang dibelanjakan wisatawan pada suatu daerah tujuan wisata sangat besar pengaruhnya bagi daerah tujuan wisata atau negara yang mengembangkan pariwisata sebagai suatu industri. Tidak hanya akan meningkatkan penerimaan devisa negara, pendapatan nasional, penerimaan pajak, tetapi sekaligus akan memperkuat posisi neraca pembayaran negara.

Alasan kedua pengembangan pariwisata itu lebih banyak bersifat non ekonomis. Salah satu motivasi wisatawan yang datang berkunjung pada suatu daerah tujuan wisata adalah untuk menyaksikan dan melihat keindahan alam dan termasuk di dalamnya cagar alam, kebun raya, tempat bersejarah, candi-candi dll. Dengan majunya pariwisata sebagai suatu industri, biaya yang besar untuk perbaikan, pemeliharaan, restorasi dan pengembangan objek dan atraksi wisata akan dapat diperoleh dari hasil kepariwisataan. Sesungguhnya dengan adanya kegiatan kepariwisataan akan timbul hasrat dan keinginan untuk memelihara aset wisata yang dimaksud mengingat Industri Pariwisata dikatakan sebagai industri tanpa cerobong asap yang bebas dari populasi dan pencemaran lainnya.

Alasan ketiga, pariwisata perlu dikembangkan adalah untuk menghilangkan kepicikan berpikir, mengurangi salah pengertian, dapat mengetahui tingkah laku orang lain yang datang berkunjung, terutama bagi masyarakat dimana proyek

kepariwisataan itu dibangun. Pertukaran pikiran dan adanya interaksi antara wisatawan yang datang dengan penduduk setempat pandangan, penapsiran dan salah pengertian dapat dihilangkan melalui kepariwisataan. Hal ini dapat terjadi, karena dalam bisnis pariwisata, mereka yang melayani wisatawan harus bersikap tanpa membedakan ras, bangsa dan agama. Jadi perbedaan politik, aliran dan kepercayaan salah pengertian, prasangka buruk akan dapat dihilangkan melalui kegiatan kepariwisataan.

Lebih lanjut, sesuai dengan Interuksi Presiden No. 9 Tahun 1969 dikatakan dalam pasal 2 bahwa tujuan pengembangan kepariwisataan adalah: Meningkatkan pendapat devisa pada khususnya dan pendapatan negara dan masyarakat pada umumnya, perluasan kesempatan serta lapangan kerja dan mendorong kegiatan industri-industri penunjang dan industri-industri samping lainnya. Memperkenalkan dan mendayagunakan keindahan alam dan kebudayaan Indonesia. Meningkatkan persaudaraan/persahabatan nasional dan internasional. (Yoeti, 2008:80).

2.1.3.1 Prinsip Pengembangan Produk Desa Wisata

Proses pembangunan desa wisata harus membutuhkan prinsip-prinsip sebagai dasar kerangka berpikir dan bertindak. Pedoman yang ditetapkan bagi desa wisata hendaknya memiliki kecendrungan terhadap fungsi utama atau tujuan jangka panjang desa wisata, serta pembangunan berkelanjutan bagi desa maupun pariwisatanya. Prinsip-prinsip desa wisata memiliki penekanan pada cakupan aspek manusia (berupa alam, sejarah-budaya dan daya tarik lainnya), serta aspek

pembangunan yang meliputi dimensi ekonomi sosial-budaya dan lingkungan hidup (Dalidjo, 2024:70).

Prinsip-prinsip bagi desa wisata harus didasarkan pada ketentuan dari hasil asesemen terhadap elemen-elemen kepariwisataan, yaitu akomodasi, transfortasi, fasilitas, infrastruktur, elemen kelembagaan/keorganisasian, serta potensi desa wisata sebagai atraksi dan aktivitas wisatawan, penetapan tujuan desa wisata, kebijakan, dan pihak-pihak yang berkepentingan/terlibat. Secara terperinci bahwa prinsip-prinsip bagi desa wisata adalah:

1. Partisipasi dan kolaborasi (penekanan pada peran aktif masyarakat dalam pengorganisasian maupun manajemen organisasi, pengelolaan, dan kepemilikan aset pariwisata yang mana masyarakat desa terlibat langsung pada proses perumusan dan pengambilan keputusan).
2. Promosi nilai-nilai kesetaraan dan keadilan (terkait pada relasi di antara masyarakat desa, termasuk minoritas, dan masyarakat desa dengan wisatawan).
3. Pemberdayaan (mengingat masyarakat desa merupakan kelompok marjinal, bisa berupa komunitas Masyarakat Adat, atau kelompok dengan keterbatasan pada konteks masyarakat yang dimiskinkan).
4. Musyawarah mufakat.
5. Gotong royong.
6. Semangat kemandirian.
7. Kesukarelaan.
8. Manfaat/keuntungan secara langsung bagi masyarakat desa.

9. Peningkatan kesadaran terhadap pelestarian alam dan budaya di kalangan masyarakat desa maupun wisatawan.
10. Kualitas pengalaman yang positif bagi masyarakat desa (dalam menerima kunjungan wisatawan) dan bagi wisatawan (saat mengunjungi desa dan berinteraksi dengan masyarakat).
11. Konservasi (kaitannya terhadap tujuan keberlangsungan daya tarik wisata, manfaat langsung secara financial bagi pembiayaan konservasinya, pembelajaran, dan keaslian atraksi dari pengaruh negatif konsumsi wisatawan).
12. Perencanaan yang terintegrasi dan pendekatan pembangunan yang berkelanjutan (pengurangan dampak buruk ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan).
13. Orientasi pada pembangunan fisik skala kecil (bukan wisata massal atau *mass tourism*).
14. Pemanfaatan pada keutamaan sarana dan prasarana desa.
15. Keselarasan pembangunan elemen-elemen kepariwisataan dengan kehidupan desa.
16. Harmonisasi kebijakan dan peraturan terkait yang berlaku (tidak bertentangan dengan kebijakan dan peraturan pada levelnasional dan lokal, bahkan international melalui serangkaian deklarasi atau rekomendasi dunia tentang pariwisata berkelanjutan, salah satunya seperti Kode Etik Pariwisata Global).
17. Optimalisasi pertanian, termasuk perladangan, pemanfaatan hasil hutan secara lestari, dan perikanan.

18. Peningkatan sensitivitas terhadap keberlangsungan warisan alam dan sosial-budaya dikalangan masyarakat desa dan wisatawan.
19. Keterbukaan/transfaransi (memudahkan warga desa, wisatawan, atau publik mengakses informasi tentang desa wisata dan tak terbatas pada fungsi promosi saja).
20. Tujuan jangka pendek pada pemecahan persoalan desa (sekitar tiga tahun) dan tujuan jangka panjang dalam keberlajutan pembangunan desa serta pariwisata (sekitar lima sampai sepuluh tahun).

Disebutkan juga Wisnawa dkk., 2021:23) bahwa dalam pengembangan desa wisata, prinsip pengembangan produk desa wisata memperhatikan, yaitu:

- a. Keaslian, di mana atraksi yang ditawarkan adalah aktivitas asli yang terjadi pada masyarakat desa tersebut.
- b. Tradisi masyarakat setempat dan menjadi keseharian yang dilakukan oleh masyarakat.
- c. Masyarakat terlibat secara aktif dalam aktivitas di desa wisata
- d. Tetap menjaga sikap dan nilai-nilai yang dia nut masyarakat dan sesuai dengan nilai dan norma sehari-hari yang ada.
- e. Tidak merusak lingkungan dan sosial masyarakat, di mana kunjungan wisatawan disesuaikan dengan daya dukung desa.

2.1.3.2 Konsep Tri-Daya dalam Pengembangan Desa Wisata

Menurut Wisnawa dkk., (2021:25) dalam pengembangan sumber daya manusia pada desa wisata maka pengelola harus memperhatikan konsep tri daya yang terdiri dari yaitu: (i) daya sosial, (ii) daya lingkungan, dan (iii) daya ekonomi.



Sumber: Kemenpar RI, 2019 Dalam Wisnawa, Prayogi & Sutapa, (2021).

Gambar 2.1.3.2
Konsep Tri Daya dalam Pengembangan Desa Wisata

Penanaman konsep Tri Daya dalam ramah kognitif bagi pengelola desa masyarakat dan desa dimulai dengan transformasi sosial di masyarakat. Transformasi sosial dalam konteks ini adalah bagaimana mengubah nilai-nilai, cara pandang masyarakat pedesean yang pada umumnya belum mampu menerima kehadiran wisatawan sebagai konsekuensi dari hadirnya pariwisata di desa. Masyarakat desa pada umumnya skeptis terhadap suatu hal yang baru. Sikap mengasingkan atau keragu-raguan disebabkan pemberitaan atau cerita negatif tentang pariwisata. Misalnya pariwisata dapat menyebabkan kawasan suci menjadi tercemar, kehilangan nilai-nilai luhur warisan nenek moyang, kedatangan

pekerja-pekerja pariwisata dan investor yang menyebabkan masyarakat lokal tergusur. Oleh karena itu, sebelum mengembangkan desa wisata perlu diadakan sosialisasi mengenai model pengembangan desa wisata yang berlandaskan “Tri Daya” yang akan memberikan manfaat ekonomi, menjaga kelestarian lingkungan dan sosial budaya. Seperti yang dipaparkan di bawah ini:

1. Daya Sosial

Daya sosial adalah kemampuan untuk berhubungan antar individu dan masyarakat sesuai dengan norma-norma dan kearifan lokal setempat yang menunjang kegiatan pariwisata sehingga tercipta keselarasan dan keefektifan. Setiap desa memiliki keunikan tersendiri dalam hubungan antar manusia yang berkaitan dengan adat dan budaya setempat. Kehadiran pariwisata tidak mengubah pola interaksi tersebut bahkan menguatkan menuju pola interaksi yang lebih efektif dalam menuju produktivitas. Misalnya di Bali, kehidupan sosial masyarakat dalam melaksanakan “Yadya” merupakan daya tarik yang unik. Kehadiran pariwisata justru memperkuat pola interaksi ini, di mana banyak wisatawan ingin melihat berbagai upacara adat.

2. Daya Lingkungan

Daya lingkungan adalah kemampuan untuk menjaga lingkungan agar tetap lestari. Kemampuan untuk menjaga lingkungan tidak terlepas dari pengetahuan, nilai dan norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat desa. Pada umumnya penduduk desa di Indonesia memiliki cara tersendiri dalam menjaga lingkungannya yang tidak lepas dari ajaran nenek moyang. Misalnya di Bali menerapkan Tri Hita Karana, yakni menjaga keselarasan hubungan dengan Sang

Pencipta, sesama manusia dan lingkungan sehingga tercipta hidup yang bahagia. Penduduk desa di Bali sangat menghormati keberadaan lingkungan di sekitarnya, di mana terdapat pembagian ruangan untuk kegiatan agama berupa pura (area suci), area untuk manusia beraktivitas (rumah penduduk, balai desa) dan ruangan untuk tumbuhan (hutan, sawah, ladang, kebun). Bahkan pada hari-hari tertentu masyarakat mengucapkan terima kasih kepada hewan dan tumbuhan dengan memberikan sesaji. Kehadiran pariwisata pada daerah pedesaan akan menguatkan kearifan lokal tersebut.

3. Daya Ekonomi

Daya ekonomi adalah kemampuan untuk meningkatkan nilai suatu produk (barang atau jasa) sehingga memiliki nilai jual melalui proses yang efektif dan efisien. Misalnya di desa memiliki banyak buah kelapa, maka buah kelapa ini dapat ditingkatkan nilai jualnya apabila diolah menjadi VCO (*Virgin Coconut Oil*). Selain bermanfaat untuk kesehatan, proses produksi dan produk VCO juga dapat dijual menjadi atraksi wisata yang bernilai tinggi.

2.1.3.3 Tahapan Pengembangan Desa Wisata

Menurut Wisnawa dkk., (2021:27) dijelaskan bahwa tahapan pengembangan wisata dimulai dari fase (i) rintisan, (ii) berkembang, (iii) maju, dan (iv) mandiri. Syarat utama sebuah desa wisata adalah SK Bupati setempat yang secara resmi menyatakan bahwa desa tersebut adalah desa wisata. Yaitu:



Sumber: Kemenpar RI, 2019 Dalam Wisnawa, dkk., (2021).

Gambar 2.1.3.3 Tahapan Pengembangan Desa Wisata

Gambar tersebut menunjukkan bahwa Tahapan Pengembangan Desa Wisata berdasarkan Kemenpar RI (2019), yang terdiri atas empat tahap, yaitu rintisan, berkembang, maju, dan mandiri. Proses ini menunjukkan peningkatan dari pengenalan potensi wisata hingga pengelolaan yang mandiri dan berkelanjutann oleh masyarakat, dengan tujuan menjadikan desa wisata sebagai penggerak ekonomi lokal dan pelestarian budaya.

Untuk dapat menilai sebuah desa wisata dalam kategori rintisan, berkembang, maju dan mandiri, digunakan beberapa kriteria sesuai dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1.3.3
Kriteria Penilaian Desa Wisata

No.	Kriteria	Subkriteria	Klasifikasi Desa Wisata			
			Rintisan	Berkembang	Maju	Mandiri
1.	Kepemilikan dan Kepengurusan Oleh Masyarakat	1. Terdapat pengelolaan yang efektif dan transfaran	✓	✓	✓	✓
		2. Legalitas lembaga atau kelompok desa	✓	✓	✓	✓
		3. Memiliki pengelolaan yang efektif dan transfaran	•	•	•	✓
		4. Memiliki kemitraan yang efektif	•	✓	✓	✓
2.	Kontribusi Terhadap Kesejahteraan Sosial	1. Menjaga martabat manusia	✓	✓	✓	✓
		2. Pembagian biaya dan keuntungan yang adil	•	✓	✓	✓
		3. Memiliki jaringan ke ekonomi lokal dan regional	•	•	✓	✓
		4. Melestarikan dan memperkaya tradisi dan budaya setempat	✓	✓	✓	✓
3.	Kontribusi Untuk Menjaga dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan	1. Melestarikan SDA	✓	✓	✓	✓
		2. Aktivitas konservasi untuk meningkatkan kualitas		✓	✓	✓

		lingkungan	•			
4.	Mendorong Terjadinya Partisifasi Interaktif Antara Masyarakat Lokal dan Pengunjung (wisatawan)	1. Terdapat interaksi antara tamu dan masyarakat local	✓	✓	✓	✓
		2. Keberlanjutan produk – produk pariwisata berbasis masyarakat	✓	✓	✓	✓
5.	Jasa Perjalanan Wisata dan Pramuwisata yang Berkualitas	1. Kualitas keahlian pramuwisata desa wisata	•	•	✓	✓
		2. Memastikan kualitas perjalanan wisata	•	•	•	✓
6.	Kualitas Makanan dan Minuman	1. Kualitas pelayanan makanan dan minuman	✓	✓	✓	✓
		2. Memastikan makanan dan minuman yang berkualitas	✓	✓	✓	✓
7.	Kualitas Akomodasi (<i>Homestay</i>)	1. Kualitas layanan akomodasi	•	✓	✓	✓
		2. Memastikan pengelolaan akomodasi yang berkualitas	•	•	✓	✓
8.	Kinerja Friendly Tour Operator	1. Komitmen pada nilai – nilai ideal desa wisata	•	✓	✓	✓
		2. Kontribusi terhadap perlindungan masyarakat dan alam	•	✓	✓	✓
		3. Dukungan terhadap ekonomi local.	•	•	✓	✓
		4. Mempromosikan indah nya penemuan, pengetahuan dan penghargaan.				

			•	✓	✓	✓
	5. Mempromosikan pengalaman yang memuaskan dan aman bagi wisatawan dan masyarakat.		✓	✓	✓	✓

Sumber: Kemenpar RI, 2019 Dalam Wisnawa, dkk (2021).

Berdasarkan Tabel di atas maka semakin lengkap kriteria dan subkriteria yang dimiliki sebuah desa wisata, maka semakin tinggi peringkatnya. Desa wisata dengan kategori mandiri sudah memenuhi seluruh kriteria dan memiliki keistimewaan antara lain: (i) memiliki pengelolaan yang efektif dan transparan, (ii) mampu memastikan kualitas perjalanan wisata, dibandingkan dengan kategori desa wisata lainnya.

Desa wisata dengan kategori maju hampir memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan, hanya saja: (i) belum memiliki pengelolaan yang efektif dan transparan, dan (ii) belum dapat memastikan kualitas perjalanan wisata, sementara desa wisata dengan kategori berkembang (i) belum memiliki pengelolaan yang efektif dan transparan, (ii) belum memiliki jaringan ke ekonomi lokal dan regional, (iii) belum memiliki kualitas keahlian pramuwisata desa wisata, (iv) belum mampu memastikan kualitas perjalanan desa wisata, (v) belum mampu memastikan pengelolaan akomodasi yang berkualitas, (vi) belum mampu memberi dukungan terhadap ekonomi lokal.

Desa wisata dengan kategori rintisan (i) belum memiliki pengelolaan yang efektif dan transparan, (ii) belum memiliki kemitraan yang efektif, (iii) belum

mampu membagi biaya dengan keuntungan yang adil, (iv) belum memiliki jaringan ekonomi lokal dan regional, (v) belum memiliki aktivitas konservasi untuk meningkatkan kualitas lingkungan, (vi) belum mampu menjamin kualitas keahlian pramuwisata desa, (vii) belum mampu memastikan kualitas perjalanan wisata, (viii) belum mampu menjamin kualitas layanan akomodasi, (ix) belum mampu memastikan pengelolaan akomodasi yang berkualitas, (x) belum memiliki komitment pada nilai-nilai ideal desa wisata, (xi) belum memiliki kontribusi terhadap perlindungan masyarakat dan alam, (xii) belum memiliki dukungan terhadap ekonomi lokal, (xiii) belum mampu mempromosikan indahnya penemuan, pengetahuan dan penghargaan.

2.1.3.4 Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Pengembangan Desa Wisata

Menurut Pradana (2016, dalam Chaerunnisa 2020) mengemukakan adanya faktor penghambat program pembangunan dalam pengembangan Desa Wisata, antara lain:

- a. Konflik internal, konflik yang terjadi antar Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), pengurus yang tidak dapat mengelola dana yang diberikan oleh pemerintah.
- b. Pengelolaan dana yang kurang tepat, penggunaan dana tidak tepat untuk membeli sesuatu yang tidak sesuai dengan kebutuhan.
- c. Koordinasi yang kurang baik, koordinasi antar Kelompok Sadara Wisata dengan dinas-dinas yang terkait jika tidak dilakukan dengan baik akan berpengaruh terhadap promosi pariwisata.

- d. Kurangnya perhatian dari pemerintah, kurangnya promosi yang dilakukan oleh pemerintah setempat sehingga akan berpengaruh terhadap kunjungan wisatawan.
- e. Kurangnya fasilitas pendukung, masih minimnya fasilitas pendukung juga menjadi faktor yang menghambat pengembangan desa wisata.

Menurut Sunaryo (2013, dalam Chaerunnisa, 2020) bahwa dijelaskan faktor pendukung dan penghambat produk pariwisata yang biasanya menjadi sistem destinasi pariwisata akan mencakup atau menyediakan setidaknya beberapa komponen utama sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung
 - a. Daya tarik wisata yang bisa berbasis utama pada alam, budaya dan minat khusus.
 - b. Akomodasi atau amenities, aksesibilitas dan transfortasi (udara, darat dan laut).
 - c. Fasilitas umum.
 - d. Fasilitas pendukung pariwisata.
 - e. Masyarakat sebagai tuan rumah (*host*) dari suatu destinasi.
2. Faktor Penghambat
 - a. Belum dikelolanya dengan baik oleh pihak pemerintah yang berwenang dan belum tertatanya dengan baik aspek prasarana dan sarana yang sebenarnya dapat dijadikan daya dukung untuk pengembangan objek wisata di daerah.

- b. Keterbatasan sarana dan prasarana serta pengelolaan terhadap potensi wisata masih belum optimal. Hal tersebut merupakan dampak dari kurangnya alokasi anggaran dana yang diperuntukkan bagi pengembangan sektor pariwisata.

2.1.3.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Desa Wisata

Menurut Dalidjo (2024:73) menyebutkan bahwa perpindahan penduduk secara masif dari kawasan pedesaan ke perkotaan telah berdampak pada kemerosotan potensi perekonomian di desa, termasuk pada level pendapatan dan lapangan kerja yang tidak adil, ancaman bagi stabilitas ekonomi lokal, hingga hilangnya potensi ekonomi desa. Tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga warisan alam dan sejarah budaya yang ditemukan atau tersimpan di desa. Pembangunan pariwisata yang seringkali terfokus pada kawasan perkotaan dan pantai, seringkali hanya menekankan pada kebutuhan, motivasi, dan kepuasan wisatawan, sehingga perhatian kepada pembangunan desa wisata menjadi terabaikan (Obonyo dan Fwaya 2012:2). Oleh karena itu, konsensus yang muncul kemudian adalah kehadiran desa wisata dapat digunakan sebagai suatu pendekatan dalam menunjukkan suatu kompleksitas masalah yang dihadapi desa (Ertuna dan Kirbas 2012) dan solusi terhadap kelarasan pembangunan desa serta pariwisata yang berkelanjutan.

Dalam segi tantangan desa wisata, terdapat pembagian sesuai cakupan ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan. Pada sektor ekonomi desa wisata memiliki fungsi dalam menjaga stabilitas potensi ekonomi lokal (pengalihan distribusi yang terpusat dari kota ke desa) dan kesejahteraan ekonomi masyarakat

desa (pemerataan pendapatan, penyediaan lapangan kerja, dan daya beli). Dengan adanya kontribusi pariwisata secara ekonomi, bukan berarti menjadikan konsumsi jasa dan produk wisata oleh wisatawan sebagai satu-satunya sumber pendapatan masyarakat desa atau tumpuan ekonomi desa. Namun, justru pariwisata memainkan peran dalam penguatan aktivitas ekonomi yang sudah terlebih dahulu yang ada di desa dan membuka jalan terhadap penciptaan diversifikasi ekonomi disana. (Dalidjo, 2024).

Pendekatan berbasis komunitas (*community-based approach*) sangat menentukan bagaimana suatu desa dan masyarakatnya menyiapkan diri menuju desa wisata. Pada kondisi tertentu, masyarakat desa pun bisa menunjukkan sikap yang begitu resisten/menolak kehadiran pariwisata, karena ketakutan-ketakutan terhadap interaksi dengan orang asing atau kekhawatiran pada kelangsungan adat desa. Hal ini wajar seperti banyak kasus terkait eksplorasi sumber daya alam yang dimiliki oleh desa adat. Penting diingat bahwa kehadiran pariwisata bagi desa adalah untuk memberikan solusi pada persoalan-persoalan desa dan pembangunan desa yang berkelanjutan. Oleh karena itu, tantangan awal pada desa wisata sangat bergantung terhadap proses asesemen dengan masyarakat desa terkait penggalian dan perlindungan potensi serta pemecahan masalah yang dihadapi. Masyarakat desa perlu terlebih dulu memiliki pemahaman yang baik mengenai konsep kepariwisataan untuk memunculkan kemauan, komitmen, dan sikap kooperatif dalam mengembangkan desa wisata (Dalidjo, 2024:75).

Secara umum, hambatan-hambatan yang mungkin terjadi bagi desa wisata namun belum menerapkan pengembangan konsep desa wisata bisa muncul dikarenakan berbagai alasan seperti tabel yang terlihat di bawah ini:

Tabel 2.1.3.5
Kendala dan Upaya bagi Desa Wisata

No.	Kendala Yang Mungkin Dihadapi	Upaya Yang Bisa Dilakukan (Rekomendasi)
1.	Kesulitan pada proses serta pendekatan dengan masyarakat lokal	Pendekatan membutuhkan interaksi langsung secara intens dengan masyarakat desa di lapangan, terutama pemimpin atau aparat desa. Lalu penyesuaian dengan karakter masyarakat desa, termasuk pengaruh pada perilaku pendamping. Proses ini bisa memakan waktu singkat atau lebih lama dari yang diduga. Isu pengorganisasian dan konsolidasi masyarakat desa atau petani akan menjadi dinamika yang menarik digali pada proses ini.
2.	Rendahnya terhadap kesadaran terhadap kepariwisataan	Bukan berarti masyarakat desa selalu menolak atau resisten pada penerapan atau pengembangan desa wisata, tetapi masyarakat terkadang tidak memiliki akses pada pemahaman tersebut, sehingga diperlukan akses dan peningkatan kapasitas terkait konsep serta kesadaran terhadap kepariwisataan.
3.	Ketiadaan atau minimnya kualitas SDM di bidang kepariwisataan	Hal ini dapat diatasi dengan mengirimkan warga desa untuk belajar di tempat lain untuk mendatangkan ahli sebagai fasilitator atau pelatih yang membantu masyarakat. Selanjutnya masyarakat dapat dikader sebagai pelatih (<i>training of trainer</i>).
4.	Keterbatasan masyarakat miskin (pemiskinan)	Sikap dan tindakan afirmasi bagi masyarakat desa untuk diberdayakan melalui keterbukaan peluang-peluang, termasuk pendidikan dan pemberdayaan.
5.	Kekhawatiran pada ketaksesuaian transfortasi, infrastruktur, fasilitas, akomodasi, dan elemen pendukung bagi wisatawan.	Persoalan ini perlu dilihat bahwa modal utama bagi suatu desa wisata adalah SDM, bukan kepada kematangan sarana dan prasarana. Namun, kebutuhan terhadap fasilitas dan layanan publik dasar harus diupayakan dan mengalami penyesuaian dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat.
6.	Ketiadaan informasi, baik itu masyarakat desa mengakses informasi terkait wisatawan maupun wisatawan mengakses informasi terhadap desa wisata	Dukungan teknologi informasi dan komunikasi, jaringan akses/konektivitas suatu desa dengan desa lain, serta strategi promosi yang tepat untuk menghindari <i>mass tourism</i> (wisatawan perlu diinformasikan dengan baik dan tepat tentang suatu desa wisata sebelum datang atau selama kunjungan, khususnya tentang kode etik selama berwisata di suatu desa wisata).
7.	Berkurangnya kebanggaan terhadap potensi atau identitas desa	Ini bisa timbul karena tekanan-tekanan terhadap desa yang menimbulkan pengerdilan terhadap nilai-nilai atau produk lokal, maka masyarakat desa perlu diapresiasi atas potensi desanya.
8.	Dominasi kawasan perkotaan atau	Penguatan terhadap peran desa (<i>bargaining position</i>)

	ketergantungan yang tinggi (relasi timpang dan tidak adil) terhadap kawasan perkotaan terkait pemenuhan kebutuhan lokal	dalam menghasilkan sesuatu, prioritas pada pemenuhan kebutuhan menurut sumberdaya lokal yang ada, dan upaya bagi akses langsung pada distribusi perdagangan.
9.	Ketidaaan peraturan/kebijakan di tingkat lokal yang terkait	Adanya kemendesakan untuk menyusun /musyawarah peraturan di tingkat desa, termasuk kode etik yang hendak diterapkan.
10.	Minimnya sumber atau dukungan financial terhadap pembiayaan kegiatan	Pencaharian sumber dana dari luar desa atau pengelolaan desa bersama jika masyarakat desa memiliki kemampuan finansial secara kolektif secara transfaran dan akuntabel.
11.	Persoalan birokrasi terkait kebutuhan atau kepengurusan administrasi	Setelah diberlakukannya UU desa, diharapkan tidak ada lagi sentralisasi terhadap pengaturan desa secara hierarkis administrasi kewilayahan, karena desa telah memiliki kewenangan dalam mengatur dirinya.
12.	Rintangan kebutuhan (<i>cultural barriers</i>), khususnya terkait stigma negatif masyarakat urban terhadap masyarakat desa atau sebaliknya.	Partisipasi yang timbal balik serta bersama dengan jalinan relasi yang kuat kepada tokoh kunci, yaitu aparat desa/tokoh masyarakat/warga dengan potensi sebagai pemimpin. Bisa juga menerapkan penyesuaian terhadap adat dan istiadat maupun norma-norma yang dianut desa selama tidak memiliki pertentangan.

Sumber: Nurdyansah Dalam Dalidjo, (2024)

Dijelaskan bahwa beberapa tantangan dan peluang dalam pengembangan desa wisata seperti yang disebutkan di bawah ini: (Peranginaning, 2025:178).

Yaitu:

1. Tantangan Sosial dan Ekonomi

Bidang pariwisata adalah salah satu sektor yang sangat dinamis dan mempunyai potensi paling besar untuk meningkatkan ekonomi di sebuah negara. Tetapi, di balik potensinya tersebut ada berbagai tantangan sosial dan ekonomi yang harus dihadapi oleh bidang pariwisata.

Berikut beberapa tantangan sosial ekonomi di bidang pariwisata:

- Tantangan *Overtourisme*: Salah satu tantangan paling nyata dalam pariwisata adalah fenomena *overtourisme*, di mana wisatawan melebihi kapasitas yang dapat ditampung oleh suatu destinasi. Hal ini dapat

menyebabkan kerusakan lingkungan yang lebih cepat. Karena, sudah pasti lingkungan tersebut akan tercemar dan ekosistem juga akan terganggu.

- b. Ekonomi yang Tidak Adil: Pariwisata memang bisa meningkatkan ekonomi di sebuah negara, namun, biasanya manfaat ekonomi tersebut tidak merata. Biasanya perusahaan besar akan memperoleh keuntungan ekonomi yang lebih besar dibandingkan dengan industri kecil yang baru berkembang.
- c. Biaya Hidup Akan Naik: Meningkatkan permintaan akan layanan dan barang oleh wisatawan dapat menyebabkan inflasi di daerah pariwisata, sehingga penduduk lokal kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- d. Kualitas Pendidikan yang Tidak Optimal: Keterbatasan dalam pendidikan dan pelatihan profesional dapat membatasi kemampuan masyarakat untuk bersaing dalam pasar pariwisata yang semakin kompetitif.
- e. Kualitas Sumber Daya Manusia: Tidak semua masyarakat lokal memiliki keterampilan yang diperlukan untuk bekerja di industri pariwisata, sehingga mereka tidak dapat memanfaatkan peluang yang ada. Hal ini membuat tidak semua masyarakat bisa mengambil manfaat dari pembangunan pariwisata.
- f. Terjadinya Perubahan Sosial: Dengan meningkatnya interaksi antara wisatawan dan penduduk lokal, dapat terjadi perubahan dalam norma dan nilai sosial yang dapat mengikis tradisi dan kebudayaan asli. Sehingga,

masyarakat lokal bisa terpengaruh oleh wisatawan yang datang.

Masyarakat lokal pun akan lupa dengan budaya asli dari daerahnya.

- g. Terjadinya Fluktuasi Ekonomi: Krisis ekonomi yang terjadi secara global juga bisa mempengaruhi pendapatan wisatawan yang datang. Hal tersebut sudah pasti akan mempengaruhi pendapatan destinasi wisata juga. Karena, biasanya wisatawan yang datang akan semakin berkutirang.
- h. Kurangnya Keterlibatan Masyarakat: Masyarakat lokal seringkali tidak dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaan pariwisata, mengakibatkan kurangnya rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan budaya mereka.

Lebih lanjut, menjelaskan terkait tantangan sosial dan ekonomi terjadi dalam bidang pariwisata memang harus mendapatkan perhatian serta tindakan yang profesional. Supaya, tantangan di atas tidak menjadi permasalahan besar yang bisa menghambat kegiatan wisata di masa depan. Untuk bisa menghadapi tantangan di atas, berikut beberapa solusi yang dapat dilakukan oleh pengelola wisata yaitu: (Peranginangin, 2025:180).

Pertama, mengelola jumlah wisatawan yang datang. Pengelola wisata bisa membatasi jumlah wisatawan yang datang dalam satu hari. Pembatasan tersebut bertujuan untuk mengurangi dampak sosial dan lingkungan yang pasti akan terjadi. Solusi lain yang bisa dilakukan adalah dengan mengajak wisatawan untuk datang ke tempat wisata yang sepi.

Kedua, melakukan program keberlanjutan ekonomi. Agar masyarakat mendapatkan manfaat ekonomi dari pembangunan wisata. perlu sekali untuk

mendorong masyarakat untuk melakukan usaha kecil. Caranya yaitu dengan mengadakan pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilan.

Ketiga, memanfaatkan inovasi dan teknologi. Untuk bisa menghadapi tantangan sosial dan ekonomi. Pengelola wisata bisa memanfaatkan teknologi untuk melakukan berbagai inovasi. Misalnya, dengan menerapkan sistem online atau juga bisa melakukan pemasaran menggunakan sistem digital.

Penerapan beberapa solusi di atas dapat digunakan untuk menghadapi tantangan sosial dan ekonomi yang pasti akan terjadi. Dengan menerapkan solusi yang tepat, maka akan membuat tantangan tersebut bisa dihadapi dengan bijak. Sehingga, tidak akan berpengaruh pada kegiatan wisata yang ada dikawasan wisata.

2. Dampak Perubahan Iklim terhadap Desa Wisata

Dalam pandangan yang lain bahwa disebutkan sebuah desa wisata umumnya menampilkan potensi alam dan budaya yang indah dan masih alami. Potensi yang masih alami tersebut membuat cuaca yang terjadi dalam wisata tersebut tidak bisa diprediksi dengan baik. Perubahan iklim yang sedang terjadi mempunyai dampak yang sangat besar dalam dunia pariwisata, khususnya di bidang desa wisata. kegiatan pariwisata juga tidak bisa dihentikan karena adanya perubahan iklim tersebut. Karena, sudah pasti akan membuat banyak sektor ikut terkena dampaknya (Peranginangin, 2025:182).

Sementara itu, perubahan iklim dan cuaca juga tidak bisa dikendalikan. Kedua aspek tersebut akan terus bekerja dan pasti akan berdampak pada kegiatan wisata yang dilakukan oleh wisatawan. dampak pemanasan global menjadi salah

satu penyebab dari perubahan iklim tersebut. Hal tersebut bisa membuat suhu di bumi semakin panas. Sehingga, bisa menyebabkan bumi semakin panas dan akan terjadi kekeringan secara berkepanjangan. Tentunya hal tersebut akan berdampak sekali dalam kegiatan pariwisata. Berikut ada beberapa bentuk dampak perubahan iklim terhadap desa wisata:

- a. Berkurangnya Wisatawan yang Datang: Perubahan iklim sudah pasti akan membuat cuaca berubah secara drastis. Apabila suhu meningkat, maka akan membuat cuaca semakin panas. Cuaca tersebut bisa membuat wisatawan enggan untuk datang ke desa wisata. Perubahan musim kemarau ke hujan juga akan mempengaruhi kedatangan wisatawan ke sebuah tempat wisata.
- b. Merusak Ekosistem: Dampak yang pasti akan terjadi adalah pada lingkungan sekitar. Ekosistem sudah pasti akan rusak dan beralih fungsi. Seperti, berkurangnya keanekaragam hayati dan rusaknya beberapa tanaman. Hal tersebut tentunya akan bisa mengurangi daya tarik wisatawan.
- c. Permukaan Air Laut Meningkat: Untuk yang selanjutnya permukaan laut akan meningkat. Permasalahan tersebut akan berdampak ke banyak hal. Seperti, terjadinya banjir, erosi, hingga merusak habitat alami yang hidup di sekitar pantai dan laut.
- d. Risiko Bencana Alam: Adanya perubahan iklim tentunya akan meningkatkan peluang untuk terjadi bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor. Bencana alam tersebut juga akan berdampak pada kegiatan

pariwisata. Seperti rusaknya fasilitas pariwisata dan infrastruktur pariwisata.

- e. Ekonomi Menurun: Perubahan iklim akan membuat jumlah wisatawan yang datang akan semakin berkurang. Sehingga, sudah pasti akan mengurangi pendapatan destinasi wisata. Hal tersebut bisa membuat ekonomi masyarakat juga menurun.
- f. Sumber Daya Berkurang: Terjadinya perubahan iklim juga akan membuat sumber daya yang ada semakin berkurang. Suhu yang semakin meningkat akan membuat ketersediaan air menjadi berkurang, permasalahan tersebut bisa membuat kegiatan pertanian menjadi terganggu, air bersih di tempat wisata juga akan semakin berkurang.

Berbagai permasalahan yang disebabkan oleh perubahan iklim di atas harus mendapat penanganan yang tepat. Supaya, tidak mempengaruhi kegiatan pariwisata (Peranginangin, 2025:185).

Pertama, yaitu dengan mengurangi emisigas rumah kaca. Pemerintah perlu sekali membuat kebijakan untuk masyarakat untuk mengurangi penggunaan emisi rumah kaca. Karena, emisi tersebut yang bisa menyebabkan perubahan iklim secara ekstrem. Pemerintah juga bisa membuat kebijakan untuk menggunakan energi yang bisa diperbarui.

Kedua, dengan memberikan edukasi ke pengelola wisata dan pengunjung wisata. perlu sekali untuk memberikan edukasi ke pengelola dan wisatawan pentingnya menjaga lingkungan supaya terhindar dari kerusakan saat terjadi

perubahan iklim. Sehingga, lingkungan tersebut akan tetap terjaga walaupun terjadi perubahan cuaca.

Itulah dua solusi yang dapat dilakukan untuk menghadapi perubahan iklim yang pasti akan terjadi. Adanya perubahan iklim memamng sudah pasti akan merusak berbagai aspek, salah satunya dalam bidang pariwisata. Sehingga, penting sekali untuk mengetahui dampak yang mungkin akan terjadi dan mengetahui solusi yang paling tepat.

3. Adaptasi terhadap Tren Global Pariwisata

Industri pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi yang paling dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor global. Mulai dari perubahan preferensi wisatawan hingga perkembangan teknologi, industri harus dapat beradaptasi agar tetap relevan dan berkelanjutan (Peranginangin, 2025:186).

Berikut ada beberapa tren global yang sedang terjadi dalam dunia pariwisata:

- a. Menggunakan Sistem Digital: Semakin berkembangnya teknologi membuat semua aspek menggunakan sistem digital dalam pengelolaannya, termasuk dalam bidang pariwisata. Sekarang sudah anada banyak sekali tempat wisata yang menggunakan sistem digital untuk pengelolaannya. Seperti, dan penggunaan aplikasi untuk bisa mengakses informasi tentang sebuah tempat wisata.
- b. Kesadaran Lingkungan Semakin Meningkat: Adanya tren global saat ini justru membuat banyak wisatawan yang sadar dengan pentingnya lingkungan. Karena, memang saat ini banyak tempat wisata yang

membahas berbagai permasalahan lingkungan. Banyak sekali wisatawan yang beralih mengunjungi tempat wisata yang mempunyai program lingkungan yang berkelanjutan.

- c. Preferensi Wisatawan Berubah: Perubahan preferensi wisatawan terhadap tempat wisata juga disebabkan oleh adanya tren global. Sekarang ini, para wisatawan justru tertarik dengan berbagai wisata lokal. Para wisatawan ingin terhubung langsung dengan masyarakat atau komunitas tersebut. Perubahan preferensi ini disebabkan oleh adanya tren global tentang pelestarian lingkungan dan juga kebudayaan.
- d. Melakukan Kerja Sama dengan Tokoh Ternama: Tren global yang berikutnya adalah melakukan kerja sama secara langsung dengan para tokoh ternama. Biasanya, tugas dari tokoh tersebut melakukan promosi terhadap desa wisata tersebut. Tren ini juga sudah menjadi tren global, yang mana setiap negara menggunakan cara iniuntuk memasarkan pariwisatanya ke masyarakat luas.
- e. Meningkatkan Permintaan Wisatawan Digital: Dampak dari adanya tren global adalah meningkatnya permintaan wisata digital yang semakin tinggi. Hal tersebut dikarenakan orang yang ingin mendapatkan pengalaman wisata secara digital dan virtual. Pengelola tempat wisata bisa menyediakan konten digital yang bisa dinikmati oleh semua kalangan dengan mudah.
- f. Penyelenggaraan Standar Kesehatan: Tren global yang baru saja terjadi di tahun 2019 kemari yaitu adanya pandemi membuat standar kesehatan

disetiap negara semakin maju. Apalagi, di tempat wisata standar kesehatam semakin ditingkatkan. Mulai dari kebersihan tempat wisata, transfortasi, akomodasi hingga tempat makan yang disediakan.

Disebutkan juga bahwa ada beberapa bentuk dampak tren global di atas memang harus dihadapi dengan bijak. Jangan sampai tren di atas mempengaruhi nilai dan budaya lokal yang sudah diterapkan sebelumnya. Para pengelola dan wisatawan juga harus melakukan adaptasi terhadap tren dan perubahan global di atas. Para pelaku usaha harus aktif melakukan adaptasi yang masih relavan dengan bidang pariwisatanya (Peranginangin, (2025:188).

Pertama, bisa dengan menerapkan pariwisata yang berkelanjutan. Salah satu cara adaptasi terhadap tren global adalah dengan menerapkan pariwisata yang berkelanjutan. Penerapan ini bisa membuat pariwisata tersebutmenjadi keberlanjutan dan bisa terus menyesuaikan terhadap perubahan zaman, baik itu dalam bentuk teknologi maupun berubahnya preferensi wisatawan.

Kedua, yaitu dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Para pelaku usaha di bidang pariwisatajuga harus bisa memanfaatkan teknologi untuk menghadapi tren global. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwasetiap aspek kehidupan sekarang ini sudah menggunakan teknologi yang canggih. Termasuk untuk bidang pariwisata, yang mana bisa memanfatkan teknologi untuk mengelola pariwisata dengan lebih mudah dan efisien, selain itu, sebagai bentuk penyesuaian juga terhadap tren global.

Ketiga, melakukan kerja sama dengan masyarakat lokal. Untuk dapat melakukan adaptasi terhadap tren global yang mudah, maka pengelola wisata bisa

melakukan kerja sama dengan masyarakat lokal. Dengan melibatkan masyarakat lokal, akan membuat penyesuaian tersebut bisa berjalan dengan mudah dan juga nantinya akan memberikan banyak manfaat untuk pengelola, masyarakat lokal dan wisatawan pastinya.

Tren global memang akan selalu terjadi dan sudah pasti akan berdampak kepada semua aspek kehidupan, termasuk pada bidang pariwisata. Dampak atau pengaruh dari tren global memang tidak bisa dihindari secara langsung. Namun, pengelola wisata bisa melakukan adaptasi terhadap perubahan tersebut. Supaya, bisa mengikuti perkembangan zaman dan juga sektor pariwisata akan terus berjalan serta bisa menghadapi tantangan yang ada.

4. Peluang Pengembangan Desa Wisata di Masa Depan

Desa wisata mempunyai potensi yang sangat besar untuk sektor pariwisata di masa depan. Pengembangan desa wisata saat ini merupakan salah satu upaya atau program pemerintah untuk membuat desa wisata menjadi lebih menarik dan bisa menarik perhatian masyarakat luas. Tentunya program tersebut akan mengangkat berbagai potensi yang ada di dalam desa tersebut, baik itu potensi alam, budaya, maupun keterampilan masyarakat (Peranginangin, 2025:190).

Desa wisata juga mempunyai peluang yang sangat besar untuk berkembang di masa depan. Tentunya dengan pembangunan yang berkelanjutan dan mempunyai tujuan yang jelas. Sekarang ini memang muncul banyak sekali Desa Wisata, yang mana ntah hanya mengikuti tren atau memang desa wisata tersebut mempunyai potensi yang besar untuk dijadikan wisata berkelanjutan. Jika hanya

mengikuti tren, maka biasanya tidak akan bertahan lama dan mempunyai peluang yang kecil untuk bisa dijadikan wisata di masa depan.

Pengelola desa wisata juga jangan sampai terjebak pada rayuan keuntungan semata, yang mana hanya memberikan keuntungan ekonomi jangka pendek saja. Selain itu, pengelola juga harus menghindari tren wisata yang hanya bersifat musiman saja. Usahakan untuk menggali potensi wisata yang adadi desa tersebut, sehingga wisata tersebut mempunyai keunikan tersendiri dan tidak ada di tempat lainnya juga.

Untuk sekarang ini, memang sudah saatnya desa wisata melakukan perubahan dan bukan sekedar mengikuti sebuah tren saja. Namun, harus juga mempunyai tujuan jangka panjang, dan bisa membangun sebuah ekosistem yang dinamis dan selalu siap menghadapi tantangan yang akan selalu datang. Sehingga, dapat menjadi pariwisata yang berkelanjutan dan mempunyai daya tarik tersendiri.

Agar dapat bertahan untuk jangka panjang. Sebuah desa wisata tidak hanya meninjolkan keindahan alam dan mengikuti tren wisata saja. Tetapi, juga harus mempertahankan budaya lokal, melindungi lingkungan, memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar, dan tidak hanya untuk kepentingan satu pihak saja. Penerapan prinsip tersebut bisa membuat desa wisata menjadi wisata international dengan kearifan lokal yang masih sangat kental.

Ada beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan desa wisata menjadi kreatif dan inovatif. Berikut beberapa peluang pengembangan desa wisata yang bisa dilakukan dengan maksimal:

1. Program Ekowisata

Peluang yang pertama yaitu wisata dengan basis ekowisata, yang mana wisata tersebut akan fokus dengan konservasi flora dan fauna yang sudah langka. Prinsip dari ekowisata juga bisa diterapkan pada program desa wisata yang berkelanjutan. Seperti, menggunakan sistem pertanian yang berkelanjutan serta melakukan pengelolaan air bersih agar bisa menjadi lebih efisien.

2. Program Wisata Berbasis Pengalaman

Sekarang ini banyak sekali wisatawan yang mencari wisata berbasis pengalaman budaya lokal. Hal tersebut bisa dijadikan satu peluang yang menjanjikan untuk masa depan. Para pengelola dapat membuka kegiatan yang akan membuat wisatawan mempunyai pengalaman yang menyenangkan. Seperti, dengan membuka kelas memasak dan juga bisa mengadakan festival budaya.

3. Melakukan Pemberdayaan Masyarakat

Salah satu cara yang dilakukan agar desa wisata dapat bertahan hingga jangka panjang adalah dengan melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar. Masyarakat yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan, cenderung dapat mengelola desa wisata dengan benar. Sehingga, desa wisata tersebut bisa bertahan dan selalu siap menghadapi tren global yang pasti akan muncul.

4. Program Wisata Sehat

Perubahan preferensi wisatawan sekarang ini banyak wisatawan yang mencari wisata yang memberikan dampak positif, seperti wisata yang sehat. Memang ada banyak sekali tempat wisata yang menyajikan program kesehatan dan kebugaran. Misalnya program yoga, program meditasi, dan bahkan ada juga

program spa.

5. Program Wisata Kuliner Sehat

Peluang yang selanjutnya yaitu program wisata kuliner yang sehat. Saat ini jarang sekali tempat wisata yang menyajikan wisata kuliner yang sehat dan baik untuk tubuh. Hal ini padahal bisa dijadikan peluang bisnis yang menjanjikan. Pengelola tempat wisata dapat menyediakan makanan dari bahan organik dan bahan lokal yang bebas dari pengawet dan zat kimia.

Dalam melakukan pengembangan desa wisata untuk masa depan ada beberapa kriteria atau aspek yang harus ada dalam proses pengembangan tersebut (Peranginangin, 2025:193).

- a. Aspek Komitmen: Untuk dapat mengembangkan desa wisata, perlu adanya komitmen yang erat antar berbagai pihak. Seperti dari masyarakat, pemerintah desa, sektor swasta, dan juga komunitas setempat.
- b. Aspek Kompetisi: Pengembangan Desa Wisata juga harus berani berkompotensi dengan pengembangan desa wisata dari daerah lain. Kompetensi yang dilakukan juga harus dengan bijak, seperti dengan meningkatkan sumber daya manusia dan yang lainnya.
- c. Aspek Juara: Jadi, program yang dibuat oleh desa wisata harus tepat sasaran. Selain itu, harus dilaksanakan dengan tepat waktu dan mempunyai manfaat yang tepat untuk semua lapisan yang berkontribusi.
- d. Aspek Kebersihan: Tempat wisata yang bersih sudah pasti akan mempunyai daya tarik yang kuat. Karena, akan membuat pengunjung nyaman selama kegiatan berwisata. Sehingga, pengelola harus

memastikan bahwa desa wisata tersebut selalu dalam keadaan yang bersih. Pengembangan desa wisata saat ini sudah pasti mempunyai tujuan yang jelas yaitu untuk membentuk pariwisata yang berkelanjutan. Desa wisata mempunyai peluang yang sangat besar untuk pariwisata Indonesia di masa depan. Jadi, tidak hanya sekedar wisata yang sedang tren saja. Namun, sebuah wisata yang berkelanjutan yang bisa memberikan manfaat untuk banyak pihak di masa sekarang dan masa depan juga.

- e. Peran Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Desa Wisata: Pemerintah juga mempunyai peran yang sangat besar dalam pengembangan desa wisata yang berkelanjutan dan mempunyai peluang yang besar untuk dijadikan wisata masa depan. Sebagai pihak yang mempunyai kewenangan tertinggi, pemerintah dapat membuat kebijakan atau program yang bisa membuat desa wisata berkembang dengan baik dan menjadi pariwisata yang berkelanjutan. Pihak yang paling berwenang dalam mengatur pengembangan desa adalah pemerintah desa itu sendiri (Peranginangin, 2025:195).

Pemerintah desa mempunyai peluang yang sangat besar dalam pembangunan nasional dan memajukan pembangunan juga. Setiap pemerintah daerah mempunyai peluang yang besar untuk memaksimalkan potensi yang ada di daerahnya, seperti potensi yang ada di setiap desa. Dengan berkembangnya sektor pariwisata di sebuah desa, otomatis akan memajukkan sektor lainnya juga. Seperti, sektor pertanian, sektor akomodasi, dan juga akan membuka banyak lapangan kerja.

Lebih lanjut, pemerintah daerah sekarang ini juga banyak melakukan investasi pada pembangunan desa wisata. karena, memang desa wisata mempunyai potensi besar untuk memajukan ekonomi di sebuah daerah. Tujuannya juga sudah pasti yaitu untuk meningkatkan devisa, meningkatkan pendapatan daerah, melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga. Pengembangan desa wisata yang dilakukan dengan efektif bisa memberikan pengaruh besar pada pertumbuhan di kawasan wisata (peranginangin, 2025:196).

Peran pemerintah dalam melakukan pengembangan desa wisata bukan hanya sekedar hak dan kewajiban saja. Melainkan, sudah menjadi tugas dan wewenang yang harus dijalankan. Menurut Muhtar Aboodin (dalam alfianto dan fauzi, 2017) bahwa peran pemerintah merupakan seluruh kegiatan atau atau usaha yang dikoordinasikan, agar mana bersumber dalam kedaulatan dan berlandaskan pada dasar negara, berkaitan dengan dan wilayah megara dengan demi terciptanya sebuah tujuan negara yang hakiki.

Dalam Jim Ife dan Frank Tesoriero, (2001) memberikan penjelasan bahwa ada beberapa peran yang harus dilakukan pemerintah desa untuk melakukan pembangunan dan pengembangan desa wisata. berikut beberapa peran yang bisa dilakukan:

1. Melakukan Animasi Sosial

Peran yang pertama yaitu pemerintah daerah bisa melakukan gerakan animasi sosial. Jadi, pemerintah mempunyai kewenangan untuk membangkitkan

semangat masyarakat untuk membuat sesuatu hal. Sehingga, masyarakat mempunyai motivasi untuk melakukan sebuah tindakan.

2. Melakukan Mediasi

Pemerintah daerah juga mempunyai kewenangan untuk melakukan mediasi. Dalam hal ini, pemerintah mempunyai kewajiban untuk mendamaikan beberapa pihak yang mempunyai konflik atau tidak mempunyai tujuan yang sama dalam hal pembangunan desa wisata.

3. Memberikan Dukungan

Selanjutnya, pemerintah juga bisa berperan untuk memberikan dukungan ke masyarakat. Selain itu, bisa juga mengembangkan dukungan pada masyarakat yang mau terlibat dalam pembangunan desa wisata.

4. Sebagai Fasilitator

Pemerintah daerah juga bisa berperan sebagai fasilitator. Jadi, pemerintah dapat menyediakan fasilitas yang bisa digunakan untuk pembangunan desa wisata. penyediaan fasilitas tersebut merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah ke desa wisata.

Menurut Peranginangin (2025:198) menyebutkan bahwa pemerintah juga bisa berperan dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan dengan pembangunan desa wisata. berikut beberapa peran dan kewenangan pemerintah dalam melakukan pengembangan desa wisata yang berkelanjutan:

- a. Membuat Regulasi: Sebagai pihak yang berwenang, pemerintah wajib membuat sebuah regulasi atau perizinan. Regulasi yang dibuat hendaknya tidak rumit dan juga transparan. Sehingga, bisa dijadikan

dukungan pemerintah dalam memberikan izin sebuah desa untuk menciptakan desa wisata yang sesuai dengan regulasi dari pemerintah.

- b. Membuat Standar Kualitas: Tidak hanya membuat regulasi saja, pemerintah juga bisa membuat sebuah standar kualitas pembangunan wisata. sehingga, pembangunan yang dilakukan bisa sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Tujuannya adalah untuk melindungi lingkungan dari dampak yang ditimbulkan dari pembangunan desa wisata tersebut.
- c. Mengembangkan Fasilitas Umum: Pemerintah juga mempunyai tugas untuk membangun dan mengembangkan fasilitas umum. Seperti jalan raya, jembatan, pengadaan air bersih, dan juga akses menuju desa wisata. sehingga, wisatawan akan mempunyai akses yang mudah untuk menuju pariwisata tersebut.
- d. Memberikan Dukungan Financial: Peran yang selanjutnya adalah pemerintah juga bisa memberikan dukungan secara financial untuk pembangunan desa wisata. Seperti, menyediakan dana hibah dan subsidi untuk pengembangan desa wisata. bisa juga dengan memberikan dana pinjaman dengan bunga yang paling rendah.
- e. Mengadakan Pelatihan: Pemerintah juga bisa menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan. Tujuannya adalah untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat lokal. Keterampilan dan pengetahuan tersebut dapat diterapkan dalam pengelolaan desa wisata di daerahnya.

f. Melakukan Kerja Sama: Pemerintah daerah juga bisa melakukan kerja sama dengan pihak lain, misalnya pada sektor swasta bisa membuat pembangunan desa wisata yang menjadi lebih optimal. Sehingga, desa wisata tersebut dapat berkembang dengan lebih cepat.

Berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam hal pembangunan desa wisata merupakan bentuk dukungan juga. Selain itu, melalui kebijakan tersebut pembangunan yang dilakukan akan sesuai dengan regulasi dan standar yang sudah ditentukan. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam pembangunan desa wisata dapat mewujudkan desa wisata yang berkelanjutan (Peranginangin, 2025:200).

2.1.4 Pariwisata Berbasis Masyarakat atau *Community Based Tourism* (CBT)

Pariwisata berbasis masyarakat merupakan konsep pendekatan yang mengedepankan prinsip-prinsip sosial masyarakat di sekitar destinasi wisata serta terlibat dalam mengembangkan potensi-potensi lokal, keikutsertaan partisipasi masyarakat dapat mempengaruhi keberlanjutan pariwisata di daerah tersebut. Istilah *Community Based Tourism* (CBT) mengacu pada kegiatan pariwisata yang dimiliki, dioprasikan dan dikelola sepenuhnya oleh masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui mata pencaharian yang berkelanjutan dan melestarikan tradisi sosial budaya yang berharga serta sumber daya alam dan warisan budaya. Secara konseptual, prinsip pengembangan pariwisata berbasis *Community Based Tourism* (CBT) adalah menjadikan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pembangunan dengan memberdayakan

masyarakat dalam berbagai kegiatan pariwisata, sehingga manfaat terbaik dari pariwisata dapat dirasakan langsung oleh masyarakat (Adyla dkk., 2023:67).

Menurut pandangan Utama & Junaedi, (2020:27) menjelaskan bahwa pariwisata berbasis *community based tourism* (CBT) merupakan model pengembangan desa yang dalam pelaksanaannya diperlukan partisipasi masyarakat dalam mengelola sumber daya. Oleh karena itu, perlu dirumuskan model yang relevan dalam pelaksanaan program tersebut. Model dipandang sebagai acuan dalam merencanakan, mengimplementasi, dan mengevaluasi program. Sebagai sebuah pendekatan, model yang harus dirumuskan harus merepresentasikan partisipasi masyarakat dalam setiap aspeknya. Harapan masyarakat desa wisata harus berpedoman pada konsep Tri Hita Karana (Dewi, et al., 2018).

Kemudian, penekanan pariwisata berbasis masyarakat pertama-tama bukan pada daya tarik, tapi pada ownership, manajement, involment (singh, 2012). Penekanan ini memberikan kesempatan kepada anggota masyarakat setempat untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengoprasian pariwisata untuk keuntungan individu dan bersama (Bhuiyan et al., 2014). Pariwisata berbasis masyarakat juga memberikan pengalaman otentik yang unik untuk pasar relung wisatawan alternatif yang sedang tumbuh yang berusaha untuk terlibat dengan komunitas lokal dan lingkungan (Fiorello dan Bo, 2012).

Disebutkan bahwa wujud dan konsep *Community Based Tourism* (CBT) adalah bentuk pengembangan desa wisata, di mana masyarakat pedesaan dilibatkan dalam pengenalan dan pengembangan potensi yang dimilikinya, baik

yang berupa sumber daya alam, budaya, maupun sumber daya manusia (Adyla dkk., 2023:69).

Lebih lanjut, Utama & Junaedi (2020:27) dalam Sunaryo (2013:139) menjelaskan bahwa pariwisata berbasis *community based tourism* (CBT) adalah pariwisata yang melibatkan masyarakat dengan kepastian manfaat yang diperoleh oleh masyarakat melalui upaya perencanaan pendampingan kepada masyarakat lokal, serta kelompok lain yang memiliki antusias atau minat kepada kepariwisataan, dengan pengelolaan pariwisata yang memberi peluang lebih besar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Dari berbagai pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Pariwisata berbasis *Community Based Tourism* (CBT) adalah suatu bentuk kegiatan pariwisata yang dimiliki, melalui pendekatan kepada masyarakat setempat seperti pembuatan keputusan/pengambilan keputusan, perencanaan, pengorganisasian, pengimplementasian, serta dioprasikan dan dikelola sepenuhnya oleh masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui mata pencaharian yang berkelanjutan dan melestarikan tradisi sosial budaya setempat.

2.1.5 Kunjungan Wisatawan

Kunjungan wisatawan merupakan salah satu merupakan indikator penting dalam pengembangan desa wisata suatu daerah. Tingkat kunjungan wisatawan dapat dipegaruhi oleh beberapa faktor, antara lain daya tarik wisata, aksesibilitas, fasilitas penunjang, promosi, serta pelayanan yang diberikan oleh masyarakat maupun pengelola destinasi wisata (Yoeti, 2020).

Menurut Kotler (2017), keputusan seseorang untuk berkunjung ke suatu

destinasi wisata tidak hanya dipengaruhi oleh kebutuhan rekreasi, tetapi juga oleh citra destinasi dan pengalaman yang diharapkan. Hal ini sejalan dengan pendapat Pitana dan Gayatri (2019) yang menegaskan bahwa persepsi wisatawan terhadap suatu produk wisata sangat menentukan niat kunjungannya.

Penelitian sebelumnya oleh Hartati (2021), mengenai kunjungan wisata di daerah menunjukkan bahwa promosi digital melalui media sosial berpengaruh signifikan terhadap jumlah kunjungan wisatawan. Hal ini diperkuat dengan temuan Umami (2020) yang menyatakan bahwa informasi yang mudah diakses melalui internet memberikan pengaruh besar terhadap kunjungan wisatawan.

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian kunjungan wisatawan adalah aktivitas seseorang atau sekelompok orang ke suatu daerah pariwisata yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti promosi, media sosial, kebijakan pembangunan pariwisata, kondisi sosial, serta strategi pemasaran destinasi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Untuk dapat memperoleh jawaban tentang perspektif sementara dalam penelitian ini, diperlukan adanya pengkajian dari beberapa penelitian terdahulu yang dianggap relevan. Dalam penelitian ini, peneliti memerlukan dukungan teoritis dan hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai refensi. Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu yang Mendukung Penelitian Ini

	Nama Peneliti,		
--	----------------	--	--

No.	Penelitian (Tahun), & Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
1.	Kurniadinata, W. & Suhartini, N. (2024). “ <i>Sustainable Tourism Development Strategy Throuh the Community-Based Tourism in Garut Regency</i> ”. Kabupaten Garut, Jawa Barat.	Growth of wisata (Kunjungan pariwisata growth), ekonomi komunitas, prinsip keberlanjutan (lingkungan, sosial, budaya)	Studi Strategis; kemungkinan kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan kasus; wawancara dan dokumentasi (abstrak)	CBT sangat penting untuk pertumbuhan pariwisata, terutama mendukung ekonomi masyarakat disekitar desa wisata; strategi yang disarankan mencakup pelibatan komunitas, pelestarian sumber daya alam serta budaya, pembangunan infrastruktur pendukung, dan peningkatan promosi.
2.	Astuti (2022). “ <i>Pengembangan Desa Wisata Pentingsari Berbasis Community Based Tourism</i> ”.	CBT (paertisipasi masyarakat, kelembagaan lokal) Kunjungan & keberlanjutan wisata	Kualitatif, (observasi, wawancara)	CBT meningkatkan kunjungan wisata, memperkuat partisipasi masyarakat, dan mendukung keberlanjutan.
3.	Ayu. Purwaningtyas, Aprilia Divi Yustika, & Eka Afrida Ermawati, (2024). “ <i>Pengembangan Wisata Berbasis Community Based Tourism di Desa Wisata Kemiren Banyuwangi</i> ”	Elemen CBT menurut Gets (sumber daya alam , & budaya manajemen, pembelajaran) indikator CBT ASEAN; faktor pendukung & penghambat	Kualitatif; wawancara mendalam, observasi, dokumentasi ; analisis data ala Miles & Huberman; sampling purposive.	Pengelolaan desa wisata sudah berjalan; skor manajemen CBT menunjukkan kategori “desa wisata berkembang”, kunjungan wisatawan belum tinggi; masyarakat sudah mulai sadar akan potensi; fasilitas & promosi perlu ditingkatkan; SDM dan kelembagaan menjadi aspek utama yang perlu diperkuat.
4.	Pradana, & Wulandari. (2022). “ <i>Implemetasi Community Based Tourism (CBT) dalam Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran</i> ”.	Implementasi CBT Kepuasan wisatawan	Mixed methods (kuesioner, wawancara)	Penelitian ini menunjukkan bahwa CBT meningkatkan kelpuasan wisatawan dan pemerataan akonomi lokal.
5.	Syabella, V. & Muljanto, M., (2025). “ <i>Model Pemberdayaan Masyarakat dalam</i>	Pemberdayaan masyarakat CBT Kunjungan	Mixed methods	CBT mendorong keterlibatan masyarakat dan peningkatan kunjungan wisata.

	Desa Wisata Berbasis <i>Community Based Tourism</i> (CBT) di Lombok Tengah”.	Wisata.		
6.	Agnes Silalahi & Rifqi Asy'ari, (2022). “Desa Wisata Kemiren: Menemukan dari Perspektif Indikator Desa Wisata dan Pariwisata Berbasis Masyarakat”.	Indikator desa wisata & pariwisata berbasis masyarakat: atraksi amenities, aksesibilitas, budaya, kearifal lokal, atribut desa wisata.	Kualitatif; observasi, wawancara mendalam, dokumentasi	Desa Kemiren telah menerapkan prinsip pariwisata berbasis masyarakat; memiliki keunikan budaya lokal Asing, atraksi budaya masih dipertahankan; fasilitas dan aturan tertulis kebudayaan perlu ditingkatkan.
7.	M. Hanafi, (2024). “ <i>Community Based Tourism</i> Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Magelang”. Desa Wisata di Magelang.	CBT, budaya lokal, lingkungan, pendapatan masyarakat, partisipasi masyarakat.	Kualitatif	Desa wisata dengan CBT memberi manfaat: pendapatan masyarakat bertambah, budaya lokal dan lingkungan tetap dijaga, masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan namun hambatan seperti seperti fasilitas dan partisipasi masih belum optimal.
8.	Wirawan, I. P. (2021). “Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Penglipuran”.	Partisipasi masyarakat Keberlanjutan wisata	Deskriptif Kualitatif	Partisipasi masyarakat tinggi dalam menjaga budaya lokal keberlanjutan desa wisata terjaga.
9.	F. Elfa Aulia et al., (2024). “Meninjau Penerapan <i>Community-Based Tourism</i> di Desa Wisata Karangrejo, Borobudur: Stakeholder Mapping Analysis”. Desa Wisata Karangrejo, Kecamatan Borobudur, Magelang, Jawa Tengah.	Dimensi-CBT: ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, politik; stakeholder mapping; peran berbagai pemangku kepentingan	Kualitatif : teknik pengumpulan data: wawancara, observasi, studi dokumen; analisis data ala Miles & Huberman	Implementasi CBT membawa dampak positif pada semua dimensi: ekonomi masyarakat meningkat (misalnya homestay, pemandu, usaha makanan), pelestarian budaya, lingkungan lebih diperhatikan, dan partisipasi masyarakat & kelembagaan mulai kuat. Tetapi peran stakeholder belum merata.
10.	Abreu et al. (2024). “ <i>Community-Based Tourism and Best Practices with the Sustainable Development Goals</i> ”.	Praaktik CBT (pemberdayaan, pelestarian budaya & lingkungan)	Studi kasus komparatif	CBT berkontribusi langsung pada 7 SDGs dan tidak langsung pada 2 SDGs; mendukung keberlanjutan sosial, budaya, dan lingkungan.

	Brazil	Kontribusi terhadap SDGs		
11.	Ni Luh Ayu Pratiwi, (2024). “Strategi Pengembangan Wisata Budaya Berbasis Kearifan Lokal Di Desa Ubud, Bali”	Strategi pengembangan wisata budaya, Wisata budaya berbasis kearifan lokal.	Kualitatif Deskriptif	Penguatan identitas budaya lokal melalui pertunjukan seni, festival tahunan, dan promosi digital berbasis cerita (<i>storytelling</i> budaya).
12.	Abrau,L., dkk. (2023) “Model Model Pemberdayaan Masyarakat dalam Desa Wisata Berbasis <i>Community-Based Tourism</i> CBT di Lombok Tengah”	Pemberdayaan masyarakat CBT Kunjungan wisata	Mix methods	CBT mendorong keterlibatan masyarakat lokal dan meningkatkan jumlah kunjungan wisata.

Sumber: Data Hasil Olahan Peneliti 2025

Sebagaimana beberapa penelitian sebelumnya yang telah dipaparkan pada Tabel 2.2 pada beberapa penelitian sebelumnya merupakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian data berupa observasi, wawancara mendalam dengan narasumber. Cela penelitian ini dapat dilihat lebih jauh lagi pada Desa Kemiren telah menerapkan prinsip pariwisata berbasis masyarakat; memiliki keunikan budaya lokal Asing, atraksi budaya masih dipertahankan; fasilitas dan aturan tertulis kebudayaan perlu ditingkatkan. Kemudian pada penelitian terdahulu juga coba melihat penggunaan CBT sangat penting untuk pertumbuhan pariwisata, terutama mendukung ekonomi masyarakat disekitar desa wisata; strategi yang disarankan mencakup pelibatan komunitas, pelestarian sumber daya alam serta budaya, pembangunan infrastruktur pendukung, dan peningkatan promosi.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah representasi visual atau tertulis yang menunjukkan hubungan antar variabel atau konstruk dalam penelitian. Kerangka ini memandu peneliti dalam mengorganisasikan data, menganalisis temuan, serta menghubungkannya dengan teori dan literatur yang ada. Kerangka konsptual berfungsi sebagai peta penelitian yang menunjukkan variabel-variabel utama, konstruk, serta hubungan yang diasumsikan di antara variabel-variabel tersebut. Kerangka konseptual dapat disajikan dalam bentuk naratif maupun grafis, sehingga memudahkan peneliti dalam mengorganisasikan data dan menghubungkannya dengan teori yang ada. (Miles, Huberman, dan Saldana, 2014).

Kerangka konseptual dalam penelitian ini berisi identifikasi teori-teori yang dijadikan dalam landasan berfikir dalam penelitian ini. Berikut adalah pemikiran teoritis pada penelitian antara lain:



Gambar 2.3

Kerangka Konseptual Teoritis Model Grounded Theory